

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi inflasi di Kabupaten Lamongan selama Triwulan II mengalami tekanan yang cukup tinggi, khususnya pada bulan Juni 2025. Tiga komoditas utama penyumbang andil perubahan harga di bulan tersebut adalah:

1. **Cabai Rawit** dengan andil sebesar **(1,5163 poin)**

Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah pada Triwulan II disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat curah hujan yang tinggi dan dampak penyakit patek yang disebabkan oleh Jamur *Colletotrichum Capsici* pada tanaman cabai, menyebabkan gagal panen di sejumlah sentra produksi. Selain itu, dikarenakan Kabupaten Lamongan adalah bukan daerah penghasil khususnya komoditas Cabai maka sangat bergantung pada pendistribusian antar wilayah yang sampai dengan saat ini belum sepenuhnya lancar turut memperparah kelangkaan pasokan di pasar Kabupaten Lamongan.

2. **Cabai Merah** dengan andil sebesar **(0,9617 poin)**

Sama halnya dengan cabai rawit, permintaan Cabai Merah cukup tinggi diakibatkan bersamaan dengan momen HBKN Idul Adha 1446 H (pada bulan Juni) serta terjadinya kelangkaan stok di pasar berdampak pada fluktuasi harga penyumbang kenaikan IPH Kabupaten Lamongan.

3. **Beras** dengan andil sebesar **(0,7787 poin)**

Harga beras premium mengalami tren kenaikan sejak awal triwulan II namun tren kenaikan tidak terjadi pada beras kualitas medium. Kondisi ini dipengaruhi oleh masa jeda panen di beberapa daerah, tingginya biaya produksi, serta peningkatan permintaan masyarakat. Fluktuasi harga beras memiliki dampak luas terhadap daya beli karena beras merupakan komoditas konsumsi utama.

Tingginya kontribusi ketiga komoditas ini menyebabkan Kabupaten Lamongan menempati posisi **10 besar daerah dengan tekanan inflasi tertinggi secara nasional** sehingga mencapai angka IPH (2,66).

Beberapa risiko yang berpotensi mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten Lamongan antara lain:

- **Faktor Musiman:** Meningkatnya permintaan menjelang peringatan hari besar keagamaan dan masa liburan sekolah.
- **Ketidakpastian Cuaca:** Potensi gangguan pasokan akibat anomali cuaca (El Nino) yang dapat berdampak pada sektor pertanian.
- **Distribusi dan Logistik:** Kendala distribusi dari wilayah produsen ke konsumen akibat infrastruktur, kenaikan tarif logistik, atau keterbatasan armada angkut.
- **Ekspektasi Inflasi:** Persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga dapat mendorong pola konsumsi yang mempercepat inflasi dari sisi permintaan yang tinggi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data inflasi dan perkembangan harga dari BPS Kabupaten Lamongan, serta hasil pemantauan TPID Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi penghambat efektifnya pengendalian inflasi di daerah selama Triwulan II, **berikut Matriks Permasalahan Pengendalian Inflasi Kabupaten Lamongan 2025 :**

NO	Permasalahan	Akar Masalah	Dampak	Rekomendasi Solusi
1	Ketergantungan pada komoditas <i>Volatile Food</i> (cabai, tomat)	Produksi terbatas hanya di musim tertentu, kurangnya diversifikasi komoditas	Lonjakan harga drastis saat pasokan terganggu	Diversifikasi komoditas, perluasan lahan hortikultura tahan cuaca ekstrem, penguatan BUMD pangan
2	Gangguan produksi akibat cuaca dan penyakit patek pada tanaman cabai	Cuaca ekstrem, hujan tak menentu, lemahnya sistem prediksi cuaca	Gagal panen, penurunan pasokan ke pasar	Penerapan early warning system cuaca untuk petani, asuransi pertanian, adopsi teknologi irigasi & greenhouse
3	Distribusi dan logistik kurang efektif	Biaya logistik tinggi, belum terkoneksi dengan daerah surplus komoditas yang sering mengalami kenaikan harga	Komoditas lambat sampai pasar, harga naik	Sinergi distribusi antar kabupaten dan Pemanfaatan teknologi logistik lokal
4	Pelaksanaan Operasi Pasar yang kurang masif	Operasi Pasar masih bersifat sementara, belum tersedianya Warung Inflasi yang orientasinya dapat lebih menekan fluktuasi harga	Intervensi harga kurang efektif, intensitas Operasi Pasar kurang masif	Penguatan kerjasama dengan stakeholder terkait (BULOG), pelaksanaan Operasi Pasar di zona merah harga secara masif serta percepatan pendirian Warung Inflasi
5	Minimnya cadangan komoditas strategis	Tidak ada sistem <i>Buffer Stock</i> daerah, belum optimal peran BUMD pangan	Tidak adanya stok bahan pokok secara cepat apabila terdapat gejolak kenaikan harga	Pembentukan cadangan pangan strategis daerah, penguatan peran BUMD/TPID dalam pengelolaan stok
6	Kurangnya edukasi dan komunikasi publik	Informasi harga dan ketersediaan stok tidak sampai ke masyarakat, minim sosialisasi alternatif konsumsi	Panic buying, serta kecenderungan permainan para tengkulak untuk menyimpan cadangan stok	Optimalisasi media sosial TPID, pemasangan papan informasi harga pasar, edukasi substitusi komoditas

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan berbagai

kebijakan untuk mengendalikan inflasi daerah, dengan fokus utama pada stabilisasi harga pangan utamanya harga komoditas cabai yang selama triwulan II jadi momok penyebab melambungnya angka IPH Kabupaten Lamongan. Implementasi strategi 4K dalam pengendalian inflasi Triwulan II 2025 di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara terintegrasi dan responsif, utamanya dalam merespons lonjakan harga cabai. Langkah-langkah seperti operasi pasar, rencana pembukaan Warung Inflasi, pemetaan pasokan, serta komunikasi aktif dengan masyarakat menjadi bagian dari sinergi TPID Lamongan dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga daerah.

Pemkab Lamongan mengimplementasikan strategi 4K, yaitu:

1. Ketersediaan Pasokan (*Availability of Supply*):

1. Pemkab Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Perekonomian dan BUMD terkait melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai rawit, cabai merah sebagai komoditas strategis penyumbang kenaikan IPH triwulan
2. Identifikasi dan pemetaan wilayah sentra produksi cabai untuk memantau potensi hasil panen dan mengantisipasi penurunan produksi akibat cuaca buruk dan penyakit patek.
3. Fasilitasi penyerapan hasil panen petani cabai lokal agar tidak terjual ke luar daerah saat permintaan lokal tinggi.

1. Keterjangkauan Harga (*Affordability of Price*):

1. Melaksanakan Operasi Pasar (OP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menekan harga pangan.
2. Melaksanakan Studi Banding ke Pemkot Mojokerto terkait rencana pembukaan Warung Inflasi dimana Pemkot Mojokerto merupakan salah satu contoh Kabupaten/Kota yang berhasil mengendalikan harga dengan metode intervensi harga pada Warung Inflasi (**PERACANGAN INFLASI**).
3. Perencanaan dan pengembangan “Warung Inflasi” sebagai langkah konkret dan berkelanjutan. Warung ini akan menjadi outlet resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjual komoditas rawan inflasi dengan harga yang disubsidi/terkendali.
4. Kolaborasi dengan Bulog melalui program RPK (Rumah Pakan Kita) dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan barang kebutuhan pokok pada harga terjangkau.

1. Kelancaran Distribusi (*Smooth Distribution*):

1. Mengoptimalkan distribusi pangan ke seluruh kecamatan dan memastikan tidak ada hambatan logistik.
2. Sinergi distribusi antar kecamatan dalam wilayah Lamongan agar pasokan komoditas merata dan tidak menumpuk di satu wilayah saja.
3. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat bergantung pada anggaran APBD maka sampai dengan saat ini belum terlibat
4. Dalam intervensi subsidi beban angkut distribusi bahan pokok, mengingat anggaran yang terbatas karena efisiensi anggaran.

1. Komunikasi Efektif (*Effective Communication*):

1. Penyebaran informasi operasi pasar dan rencana Warung Inflasi melalui media sosial resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Perumda Pasar selaku *leading*

- sector* rencana pembukaan Warung Inflasi serta melalui pengeras suara pasar dan desa.
2. Publikasi harga komoditas strategis harian di papan informasi pasar tradisional dan website Dinas Perdagangan (**SIPULDABAPOK**) agar masyarakat dapat membandingkan harga dan tidak terpengaruh informasi hoaks.
 3. Edukasi kepada masyarakat mengenai Perilaku konsumsi rasional dan tidak panic buying dan Pentingnya belanja bijak dan substitusi komoditas.
 4. Serta berkoordinasi secara masif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya percepatan pendirian Warung Inflasi di Kabupaten Lamongan karena langkah ini telah terbukti berhasil pada penerapan pengendalian inflasi di Kota Mojokerto.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui TPID telah melaksanakan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, pemantauan harga, serta perencanaan pembukaan Warung Inflasi. Dengan melambungnya harga cabai Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya melakukan Operasi Pasar yang dilakukan secara kolaborasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bagian Perekonomian yang berlokasi di Pasar Sidoharjo Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian maka berikut adalah matriks evaluasi berdasarkan dimensi strategi 4K Pengendalian Inflasi:

Dimensi 4K	Evaluasi Pelaksanaan	Catatan Kritis
Ketersediaan Pasokan	Upaya identifikasi sentra Produksi dan kerja sama dengan petani lokal telah dilakukan.	Belum ada sistem cadangan stok pangan daerah yang memadai. Koordinasi produksi belum terintegrasi lintas musim.
Keterjangkauan Harga	Pelaksanaan Operasional Warung Inflasi masih dalam taraf proses pengurusan dan persiapan yang matang	Giat Operasi Pasar bersifat sementara, belum menyentuh akar masalah harga dari sisi hulu. Efeknya tidak merata antar kecamatan. Maka segera diperlukan percepatan pendirian Warung Inflasi agar dampaknya dapat menyeluruh dan sifatnya dapat berkelanjutan untuk stabilisasi harga
Kelancaran Distribusi	Terdapat upaya fasilitasi distribusi melalui OPD dan kerja sama antar wilayah.	Distribusi masih terganggu oleh infrastruktur terbatas dan minimnya armada logistik daerah. Tidak ada sistem logistik darurat saat harga melonjak semua ini dikarenakan masih sangat bergantungnya pada anggaran APBD.

Dimensi 4K	Evaluasi Pelaksanaan	Catatan Kritis
Komunikasi Efektif	Informasi harga dan jadwal Operasi Pasar mulai disampaikan lewat media sosial dan papan harga pasar.	Belum menjangkau seluruh masyarakat, terutama pedesaan. Edukasi substitusi konsumsi masih minim, harapannya agar segera terealisasi pendirian Warung Inflasi pada setiap kecamatan agar upaya pengendalian inflasi lebih merata dari hulu ke hilir

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan selama Triwulan II 2025 menunjukkan adanya upaya nyata namun belum cukup optimal. Kebijakan lebih bersifat reaktif daripada preventif, dan pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa:

- Minimnya infrastruktur logistik (Subsidi Biaya Angkut) dan cadangan pangan
- Kurangnya basis data digital untuk deteksi dini gejolak harga
- Perluasan jangkauan komunikasi publik yang belum merata
- Belum tersedianya suatu distrik penekan harga disaat harga bahan pokok melambung tinggi contohnya : Warung Inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan selama Triwulan II Tahun 2025, berikut disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka memperkuat upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan:

1. **Perkuat Produksi dan Cadangan Komoditas Utama**

Fokus pada peningkatan produksi lokal cabai, beras, dan tomat dan komoditas lain yang sering terdampak fluktuasi harga serta bentuk cadangan pangan daerah agar pasokan tetap stabil saat terjadi lonjakan harga.

2. **Percepat Operasi Pasar dan Realisasi Warung Inflasi**

Operasi Pasar dan Warung Inflasi sebagai intervensi rutin di zona rawan harga, bukan hanya saat harga sudah melonjak serta distribusikan ke seluruh kecamatan agar upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan lebih merata.

3. **Perbaiki Distribusi dan Logistik Pangan Lokal**

Pastikan jalur distribusi lancar dari petani ke pasar dengan dukungan armada logistik, terutama saat harga mulai naik.

4. **Kuatkan Komunikasi Harga dan Edukasi Publik**

Sampaikan informasi harga harian secara terbuka dan edukasi masyarakat untuk tidak panic buying serta konsumsi bijak.

5. **Bangun Sistem Pemantauan Cepat dan Terintegrasi**

Kembangkan sistem digital untuk deteksi dini gejolak harga, pemantauan stok, dan pelaporan pasar secara real-time.

6. **Aktifkan Peran BUMD atau Koperasi dalam Penyerapan Hasil Panen**

Melibatkan BUMD contohnya Perumda Pasar Kabupaten Lamongan sebagai penyerap hasil tani dan penyalur komoditas melalui Warung Inflasi yang proyeksinya akan menjadi *Leading Sector* Perumda Pasar Kabupaten Lamongan dalam upaya strategis pengendalian harga bahan pokok di Kabupaten Lamongan.

7. **Sinergi Lintas Daerah dan Advokasi ke Pusat**

Bangun kerja sama pasokan antar kabupaten dan advokasi agar kebijakan pusat (seperti HET dan distribusi) lebih fleksibel untuk kondisi lokal tujuannya agar IPH di Kabupaten

Lamongan tetap terjaga dan stabil.